

ABSTRAK

Auliana. *Implikasi Dari Pencairan Klaim Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Pembagian Warisan (Studi Kasus Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat)*. Skripsi, Pembimbing: Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Klaim, Asuransi, BPJS Ketenagakerjaan, Warisan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pencairan klaim BPJS Ketenagakerjaan yang tidak hanya berkaitan dengan prosedur administratif, tetapi juga menimbulkan implikasi terhadap pembagian warisan. Penelitian ini mengkaji kasus seorang peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, yang meninggal dunia dalam keadaan belum menikah dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia, sehingga saudara kandung menjadi ahli waris yang berhak menerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian berada di Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah empat orang yang merupakan saudara kandung pewaris sekaligus ahli waris, terdiri dari dua saudara laki-laki dan dua saudara perempuan. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan temuan lapangan dengan konsep hukum waris Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pencairan klaim BPJS Ketenagakerjaan dilakukan melalui tahapan administratif yang telah ditentukan, dengan salah satu ahli waris bertindak sebagai pengurus klaim. Dana yang diperoleh digunakan untuk keperluan pengurusan jenazah, pelunasan utang, serta kebutuhan lainnya sebelum dibagikan kepada ahli waris. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme *ishlah* dalam pembagian dana merupakan bentuk adaptasi masyarakat dalam menjaga keharmonisan keluarga melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Mekanisme tersebut tidak mengabaikan hak-hak ahli waris, tetapi menjadi alternatif penyelesaian yang ditempuh secara kekeluargaan guna mewujudkan keadilan dan menghindari potensi konflik di antara para ahli waris.